

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembentukan kelembagaan KTH Mandiri Jaya yang tidak melalui fasilitasi oleh Penyuluh Kehutanan pada CDK Wilayah III Provinsi Jawa Tengah menyebabkan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan masih berada pada tahap penyadaran dan pengkapasitasan awal pada kelola kelembagaan dan kawasan. Namun, persepsi masyarakat menilai bahwa peran yang dilakukan telah berjalan baik pada kategori Tinggi dengan skor 2,53 karena mendapatkan pendampingan untuk membantu kelompok melaksanakan kebijakan perhutanan sosial dengan lebih baik. Penelitian ini menemukan adanya ketimpangan peran dan dinamika pendampingan yang cukup signifikan terhadap kehadiran Penyuluh Kehutanan Kecamatan Bringin, khususnya dalam mendorong kemandirian usaha kelompok. Berikut adalah fenomena yang ditemukan untuk rumusan masalah penelitian.

1. Peran Fasilitatif: Kondisi kelola kelembagaan KTH Mandiri Jaya mengalami peningkatan pada pembentukan struktur organisasi kepengurusan secara legal formal yang disahkan oleh Kepala Desa Nyemoh. Selain itu, pendampingan intensif yang diberikan kepada pengurus meningkatkan pengetahuan kelompok untuk mengisi buku administrasi berupa daftar hadir pertemuan secara mandiri dan mematuhi kewajiban pembayaran PNPB saat panen jagung tiba. Pencapaian ini diperkuat oleh persepsi mayoritas anggota kelompok sebesar 3,07. Namun, terdapat catatan kritis terhadap pendampingan tidak rutin sebagai dampak

dari ketimpangan jumlah penyuluh kehutanan menyebabkan belum tersedia dokumen rencana kegiatan (RKT) dan AD/ART yang dirumuskan secara partisipatif dan terjadinya sentralisasi peran pengurus pada ketua KTH.

2. Peran Edukasional: Kehadiran penyuluh kehutanan membantu kelompok menerapkan sistem pertanian agroforestri untuk menanam tanaman berkayu dan buah-buahan pada lahan yang sama dengan produksi jagung demi menjaga kelestarian hutan di Desa Nyemoh. Kondisi ini mendapatkan penilaian positif sebesar 2,73 sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan pengetahuan diversifikasi usaha produk kehutanan. Namun, proses edukasi yang cenderung masif di awal program menyebabkan lemahnya pendampingan pemeliharaan bibit dan pemupukan untuk produktivitas tanaman serta ketiadaan pelatihan kewirausahaan untuk mengolah komoditas lokal pasca-panen.
3. Peran Representatif: Keterbatasan diversifikasi usaha produk kehutanan KTH Mandiri Jaya disebabkan oleh tidak adanya bantuan alat ekonomi produktif dan modal usaha yang menempatkan petani untuk meminjam kepada juragan jagung dalam memenuhi kebutuhan produksi pertanian. Hal ini mendorong tingginya kecenderungan penjualan jagung kepada tengkulak sehingga tidak memiliki kemandirian dalam memasarkan produknya kepada industri. Selain itu, jejaring pemasaran untuk produksi balsa mengalami hambatan pada pencatatan hasil hutan kayu sehingga peran ini mendapatkan penilaian rendah sebesar 1,93 dari kelompok.

4. Peran Teknis: Kegiatan pemantauan rencana kegiatan tahunan kelompok belum berjalan optimal karena ketiadaan dokumen RKT terbaru yang disusun secara partisipatif dan ruang konsultasi sebagai peningkatan kapasitas kelompok dalam mengatasi masalahnya. Hal ini menyebabkan pemantauan yang dilakukan cenderung dilakukan pada lahan hutan untuk memastikan masa hidup tanaman tegakan lebih optimal. Selain itu, penyuluh kehutanan menggunakan diskresinya untuk menyusun buku administrasi secara mandiri dalam mengatasi kapasitas keterbatasan sumber daya manusia KTH Mandiri Jaya yang lemah dalam adopsi teknologi dan melaksanakan pengajuan penataan tapal batas dalam sebagai bentuk tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban kelompok. Kondisi ini menjadi pemicu nilai yang tidak optimal sebesar 2,53 dari kelompok.

Capaian terhadap peran yang telah dijalankan memiliki faktor yang dapat menjadi pendorong dan penghambat keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan di KTH Mandiri Jaya sebagaimana dijelaskan berikut.

1. Faktor Pendorong: Keberhasilan penyuluh kehutanan dalam melakukan pendekatan pendampingan di Desa Nyemoh didorong oleh faktor internal berupa rasa tanggung jawab dan inisiatif yang tinggi untuk memfasilitasi akses kepada bantuan bibit swadaya untuk meningkatkan tutupan lahan yang sempat mengalami gagal panen karena kemarau panjang. Selain itu, faktor eksternal yang menjadi pondasi utama adalah tingginya modal sosial yang dimiliki masyarakat terhadap nilai gotong royong dan antusiasme menghadiri pertemuan karena adanya ketergantungan ekonomi pada sektor

hutan. Faktor ini mendapat penilaian sebesar 3,25 dari anggota KTH.

2. Faktor Penghambat: Hambatan pemberdayaan yang dialami oleh penyuluh kehutanan bersifat sistemis-organisasional yang diakibatkan oleh beban birokrasi yang berlebihan sehingga frekuensi pertemuan tidak bisa dilakukan secara merata dan terbatas hanya pada pengurus KTH aktif. Keterbatasan ini diperparah oleh kebijakan efisiensi anggaran pusat, ketiadaan alat bantu media penyuluhan yang berbentuk visual, serta ego sektoral antar instansi yang menghambat KTH mengakses bantuan pupuk subsidi dan sarana pertanian. Faktor ini mendapat penilaian rendah sebesar 1,86 dari KTH Mandiri Jaya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan terhadap hasil penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas pendampingan perhutanan sosial di KTH Mandiri Jaya oleh Penyuluh Kehutanan Kecamatan Bringin adalah sebagai berikut.

1. Optimalisasi Peran Fasilitatif melalui Peningkatan Intensitas Kunjungan

Intensitas kunjungan yang dilakukan dengan KUPS secara rutin dan merata dapat membantu proses musyawarah dalam merumuskan rencana kerja dan aturan kelompok dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh setiap kelompok usaha. Selain itu, pendampingan terhadap struktur organisasi dapat diperkuat melalui pembagian tugas pengurus yang lebih jelas agar terdapat kontribusi yang aktif dari seluruh pengurus dalam pengelolaan kelembagaan KTH Mandiri Jaya.

2. Penguatan Peran Edukasional melalui Pelatihan Pemeliharaan Tanaman dan Kewirausahaan

Penyuluhan yang berfokus pada pemeliharaan tanaman MPTS, seperti pohon alpukat, mangga, nangka, dan kelengkeng dapat memberikan pengetahuan dan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman yang lebih optimal, seperti penggunaan pupuk organik. Selain itu, inovasi penjualan produk pertanian kelompok melalui pelatihan kewirausahaan untuk mengubah produk mentah menjadi produk jadi bisa menjadi solusi diversifikasi usaha yang lebih inovatif dan meningkatkan nilai jual.

3. Penguatan Peran Representatif melalui Pembangunan Jejaring Kerja Sama dan Pelatihan GANISPH

Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) dapat menjadi langkah strategis yang membantu penyuluh kehutanan membangun jejaring kerja sama yang lebih luas dalam memfasilitasi akses permodalan, pengadaan alat ekonomi produktif, dan pemasaran untuk memaksimalkan jaringan usaha KTH Mandiri Jaya. Sinergi ini juga dapat mendorong pelatihan terhadap GANISPH sebagai solusi atas terbenturnya perizinan pemasaran terhadap kayu balsa di kawasan hutan negara. Selain itu, dukungan pendanaan terhadap fasilitasi penataan tapal batas dalam dapat dilakukan untuk memenuhi kewajiban KTH Mandiri Jaya sebagai penerima pengelolaan perhutanan sosial.

4. Peningkatan Peran Teknis melalui Pendampingan Konsultatif yang Merata

Ketersediaan ruang diskusi dan konsultasi yang dapat diakses secara merata oleh seluruh KUPS memberikan solusi praktis terhadap

kendala lapangan yang dialami oleh KTH Mandiri Jaya dengan lebih optimal. Pendampingan tersebut dapat menjadi bentuk pemantauan untuk memastikan bahwa kinerja KUPS telah dijalankan sesuai dengan rencana kerja yang disusun sehingga meningkatkan produktivitas usaha dan kelembagaan kelompok. Selain itu, adanya regenerasi pengurus KTH menjadi strategi peningkatan kapasitas literasi digital kelompok yang dapat membantu urusan administratif penyuluh kehutanan.

5. Penguatan Dukungan Organisasi melalui Penambahan Tenaga Penyuluh dan Pemenuhan Sarana Prasarana

Pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah diharapkan melakukan advokasi untuk menambah kuota tenaga kerja penyuluh kehutanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan mengurangi ketimpangan jumlah KTH yang perlu diberdayakan. Adanya penambahan ini bermanfaat untuk mengurangi beban kerja terhadap wilayah kerja yang terlalu luas sehingga pendampingan dapat dilakukan secara lebih intensif dan merata kepada KTH dengan KUPS yang belum memiliki kelembagaan yang baik. Selain itu, pemenuhan sarana prasarana pendukung penyuluhan, seperti media penyuluhan, alat peraga, dan fasilitas operasional dapat ditingkatkan agar penyuluh kehutanan dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan lebih inovatif dan mendukung pemberdayaan KTH secara lebih efektif.